

## RESENSI BUKU REFORMASI PENDIDIKAN DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH

Oleh: **Husain Haikal**

FIS Universitas Negeri Yogyakarta

Diterima : 30 Nopember 2000 / disetujui : 28 Januari 2001

<b>Pengarang</b>	<b>: Reformasi Pendidikan Dalam Otonomi Daerah</b>
<b>Pengarang</b>	<b>: Dr. Fasli Jalal dan Prof. Dr. Dedi Supriadi</b>
<b>Penerbit</b>	<b>: Adicita Karya Nusa Yogyakarta</b>
<b>ISBN</b>	<b>: 979-9246-65-2</b>
<b>Isi Buku</b>	<b>: 459 halaman</b>

Bidang pendidikan, selain terabaikan, juga sangat meminggirkan *wong cilik*, walaupun sebagian anak-anak mereka mempunyai *inner motivation* yang cukup tinggi untuk belajar dan maju. Hal ini sempat direkam dalam salah satu perjalanan seorang cendekiawan serta pendidik, Jalaluddin Rakhmat, yang produktif dengan berbagai karya bermutu dalam beragam topik kajian, sempat menuliskan:

... aku terkejut ketika kaca mobilku diketuk oleh jari-jari kecil. Di luar hujan deras. Lewat kaca yang remang-remang aku melihat anak kecil yang menggigil kedinginan. Tubuhnya basah kuyup. Arlojiku menunjukkan pukul dua dinihari. "Pak, ini tauco seribu tiga. Beli, pak, buat bayar uang sekolah", suaranya (1998: 182).

Realita ini mengungkap berbagai ketimpangan yang berlaku sejak zaman orla, serta makin bertambah parah pada masa orba. Untuk lebih jelasnya tolong dikaji karya Rerivond Baswir *et. al.* (1999). Semua ini akan dicoba diselesaikan melalui kajian reformasi dalam konteks otonomi daerah seperti yang disajikan Fasli Jalal dan Dedi Supriadi.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, tulisan ini akan mencoba menyajikan berbagai problema yang berkaitan dengan reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah yang disajikan Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. Untuk mengatasi hal itu kunci utamanya adalah perbaikan pendidikan yang sejak mereka terabaikan. Paling mudah hal ini tercermin dengan minimnya dana pendidikan yang disediakan. Sedangkan sejak diletakkan fon-

dasi orba, telah dibuat TAP MPRS No. XXVII/1966 yang menetapkan anggaran pendidikan sebesar 25%. Hanya anggaran pendidikan Indonesia tidak pernah melampaui 7% sepanjang masa orba (A. Syafii Maarif, 2001 : 1)

Nampaknya para petinggi pendidikan asyik dengan berbagai proyek. Atau mereka yang berwenang dalam bidang pendidikan, hanya sibuk bergulat dengan kurikulum atau mengganti nama sekolah, SMP menjadi SLTP serta sejenisnya. Sementara mutu pendidikan makin merosot, dan penghasilan guru atau dosen makin melorot. Indonesia seakan-akan berlari di tempat, sementara negara jiran, atau tetangga seperti Malaysia, makin berkembang serta bermutu dunia pendidikannya. Akibatnya Indonesia makin kekurangan SDM yang bermutu dan kekurangan ini diisi orang asing sehingga mereka berjumlah sekitar 7000 orang. Menariknya semua mereka mempunyai gaji lebih tinggi dibandingkan gaji 4 juta PNS? Tinjauan kritis pendidikan masa orla dan orba perlu lebih disajikan lagi secara kritis dan objektif sehingga pemecahan yang lebih bermakna.

Realita pahit ini telah membuat editor mengantarkan kumpulan draf laporan berbagai ragam pokja yang dibahas dalam sidang pleno di Bappenas serta 'dimantapkan' dalam konferensi yang dihadiri 700 peserta dari kalangan pemerintah, lembaga-lembaga donor (Bank Dunia, ADB, AusAID, dan JICA) menjadi buku yang dibedah ini. Yang disajikan makin menguntungkan pembaca karena semuanya lengkap disuguhkan secara utuh, bahkan dilengkapi tanggapan para peserta.

Tanggapan yang cukup bermakna berupa penilaian Prof. Dr. Awaluddin Djamin, M.P.A., Ketua Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) berikut ini:

... hingga saat ini tidak ada orang yang tahu persis gambaran utuh keadaan pendidikan nasional Indonesia. Dalam rangka otonomi daerah, sebaiknya Bappeda mengkoordinasikan inventarisasi data menyeluruh tentang pendidikan di tingkat daerah. Hasil inventarisasi itu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan sistem yang ada guna ditindaklanjuti.

BPPN memandang bahwa prioritas pendidikan nasional adalah peningkatan dan kesejahteraan guru dan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah lebih bermutu. BPPN setuju dengan gagasan untuk memisahkan status guru dari PNS lainnya yang memungkinkan dikembangkannya kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik profesi keguruan. BPPN juga menyarankan agar Dirjen Dikti dan Ditjen Dikdasmen dibebaskan dari tugas-tugas pengelolaan teknis (hlm. lii).

Yang lebih menyengat lagi tanggapan yang disajikan salah seorang aktifis LSM, Utomo Dananjaya. Dia mengemukakan bahwa: "Ada kesan bahwa pendidikan nasional identik dengan pendidikan negara tetang sekolah negeri, PNS, anggaran belanja negara, ataupun siswa sekolah negeri tanpa menyentuh sekitar pendidikan swasta." (hlm. liv)

Dalam buku disajikan delapan bagian yang diharapkan sebagai obat bagi upaya melahirkan pendidikan yang bermutu sehingga mampu menampilkan Indonesia sebagai bangsa yang disegani. Untuk mudahnya seyogianya disajikan delapan bagian tadi:

Bagian 1 Filosofi, Kebijakan, dan Strategi Pendidikan Nasional, antara lain menyajikan suasana 'kelabu' pendidikan Indonesia sampai dewasa ini, refleksi sejarah kritis pendidikan nasional, pengaruh lingkungan strategis, pendidikan menuju masyarakat Indo-nesia Baru, kebijakan dasar, strategi pendidikan nasional. Sebagai kajian

terpenting dan fondasi pendidikan Indonesia, kajian ini meliputi 116 hlm.

Bagian 2 Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Dasar, antara lain sempat menge-tengahkan berbagai kendala yang telah membudaya, beragam alternatif pemecahan, ber-dasarkan berbagai pengalaman sebe-lumnya, terutama dalam pendidikan dasar.

Bagian 3 Manajemen Berbasis Sekolah, merupakan satu kajian yang relatif belum banyak dikenal masyarakat, Akibatnya banyak yang mempertanyakan seberapa jauh keberhasilannya sekiranya diterapkan dalam dinamika kiprah pendidikan yang ada. Dua bagian ini, yaitu Bagian 2 dan 3, merupakan laporan Pokja Desentralisasi Pendidikan dan Manajemen Berbasis Sekolah. Kajian dua bagian ini meliputi 54 hlm.

Bagian 4 Pendidikan Berbasis Sekolah mengetengahkan berbagai konsep, langkah-langkah pelaksanaannya. Tak lupa pula disuguhkan berbagai kendala, serta saran-saran awal pemecahannya. Dikatakan setiap pembahasan topik ini, apalagi kalau harus dijabarkan ke dalam program nyata, hampir selalu berakhir dengan ketidakjelasan. Kajian ini meliputi 45 hlm.

Bagian 5 Rekomendasi Pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan. Disajikan minimnya kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan. Kemudian dirasa perlu disajikan pula pendidikan prajabatan calon guru, rekrutmen, dan penempatan guru, peningkatan mutu guru, serta pengem-bangan karier guru. Untuk memperbaiki kesejahteraan guru di-sajikan permasalahan dan lima rekomendasi cara penyelesaiannya. Yang terpenting ba-gaimana rekomendasi dapat segera diwujudkan. Kajian bagian ini meliputi 80 hlm.

Bagian 6 Restrukturisasi Sistem Karier dan Insentif Guru nampaknya lahir sebagai konsekwensi logis bagi terpinggirnnya karier dan insentif guru. Topik ini nampak lebih menyoroti berbagai kelemahan yang ada, dan lebih memojokkan peran guru. Topik ini meliputi 56 hlm.

Bagian 7 Paradigma Baru Pendidikan Tinggi, atau PT. Kajian ini lebih merupakan suatu upaya untuk lebih mensosialisasikan paradigma baru dan strategi baru. Apalagi

selama ini 'dinamika' PT terlalu dikekang pusat dan kurang memberikan kreativitas para pengelola yang terlibat langsung dan berada di lapangan. Kajian ini meliputi 53 hlm.

Bagian 8 Pendanaan Pendidikan di Indonesia. Masalah biaya adalah masalah yang membuat siapa saja yang terlibat dalam dunia pendidikan menjadi *byayaan*. Sekalipun sejak awal hal ini telah menjadi perhatian utama, tapi realitanya lebih merupakan buah bibir yang sulit diwujudkan dengan berbagai alasan. Kajian ini meliputi 25 hlm.

Realita pahit di atas, bukan merupakan hal baru sejak Indonesia merdeka. Baik sejak zaman orla, orba, dan di awal reformasi keadaan tak banyak berubah. Kepahitan zaman orla makin diperparah pada zaman orba. Terbukti selama berkuasa, Soeharto melakukan pendekatan yang kental sekali aroma elitnya, dan terasa betapa mempesonakan gedung-gedung megah yang berhasil dibangun. Hanya saja banyak pula anggota masya-rakat bawah yang makin terpinggirkan dan hak-haknya terabaikan sama sekali.

Kesenjangan merupakan realita yang menyedihkan, telah dilukiskan secara bermakna oleh cendekiawan yang tampil sebagai pendobrak dan kemudian dipercaya sebagai ketua MPR pada era reformasi. Ini nampak dari uraian dalam *Refleksi Amien Rais*. Untuk lebih jelasnya tolong dibaca uraian dalam buku (1997: 127) ini:

Bila kita keluar dari Bandara Soekarno-Hatta lewat jalan layang ke Jakarta, lihatlah ke kanan dan ke kiri, di bawah jalan layang yang megah itu. Tiba-tiba mata kita akan menatap pemandangan yang memilukan. Beribuan rumah yang berjubel, sebagian reyot, compang-camping dan kebanyakan tidak layak huni segera 'menyengat' mata dan nurani kita. Memang gedung-gedung jangkung yang hebat dan modern juga terlihat dari jalan layang yang baru dibuka itu, tetapi mau tidak mau nurani kita segera ter-tusuk oleh sebuah kontras.

Apa yang disajikan dalam buku *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* ini lebih menggunakan paradigma barat, dan kurang membumi di Indonesia. Terbukti belum sempat disinggung masalah

pondok dan pesantren yang telah membuktikan diri mampu menghadapi berbagai cabaran yang ada, serta terus melakukan berbagai pembaharuan. Ini antara lain dibuktikan dengan lahirnya berbagai pondok modern. Tidak dapat diingkari cukup bermutunya sistem pendidikan barat, khususnya sistem pendidikan Belanda. Hanya saja tidak semua sistem pendidikan Belanda patut dijadikan contoh, sama halnya dengan sistem pendidikan Barat pada umumnya. Salah satu contoh hasil negatif pendidikan Belanda dapat dilihat kebiasaan ibu rumah tangga Belanda yang membuang kepingan-kepingan roti sebanyak 79.000 ton pada tahun 1970. Sementara jutaan manusia di berbagai negara lain mati karena kelaparan (Elza Peldi Taher, 1985: 431).

Dampak negatif pendidikan Barat jelas terlukis dari penggunaan narkoba, merosotnya moral, dan wabah *veneral diseases* serta makin banyaknya anak-anak yang lahir di luar nikah. Memang sebagian tetap bersiteguh dengan kehebatan pendidikan Barat, tetapi sebagian pakar pendidikan Barat sendiri dalam kegalauan, hal ini antara lain tercermin dalam uraian R. Freeman Butts (1973: 564) berikut ini:

*Or would modern civilization be able to regenerate itself and move toward a world-wide civilization that could manage to achieve a more just, humane, and equitable condition of life for the peoples of the world? Much depends upon the role that education plays in the future. Will western education become formalistic, congealing, constricted, and isolated as education became in the dispersive periods of Mesopotamian and Egyptian education?*

Jelas beragam kelemahan pendidikan Barat dan akibatnya yang menghancurkan masa depan generasi muda secara tidak langsung dengan 'amukan' narkoba dan *aids*. Dalam kasus *AIDS* di USA, ada baiknya dikaji uraian berikut ini:

Sekarang ini sekitar satu juta orang Amerika terkena *HIV* dan 339.250 ribu *AIDS*. Malahan *AIDS* merupakan sebab terpenting kematian wanita kulit hitam usia 15-40 tahun di New Jersey. Berapa biaya yang dikeluarkan? Pada tahun fiskal 1994 saja,

Kongres Amerika memerintahkan pengeluaran sebesar 2,5 milyar dolar atau 5 trilyun rupiah lebih untuk penelitian, sementara biaya pengobatan *HIV/AIDS* dikeluarkan dana sebanyak 10,4 milyar dolar atau sekitar 21 trilyun rupiah. (*Refleksi Amien Rais*, hlm. 81).

Selain itu ada pula pemusnahan langsung generasi muda lewat pembunuhan yang dilakukan kaum remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Walaupun demikian masih banyak para pengagumnya di Indonesia, dan lahirlah berbagai sekolah plus yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Fuad Hassan sebagai mantan Mendikbud menilai sekolah-sekolah plus tersebut sebagai katup pengaman karena rendah dan tertinggalnya pendidikan di Indonesia. ("Sekolah Plus Pintu Gerbang ke Luar Negeri?", *Tempo*, 18 Maret 2001, hlm. 68.)

Sayangnya sejak kemenangan gerakan reformasi perbaikan pendidikan belum mendapatkan perhatian. Lebih menyedihkan lagi dalam tahun 2001 ini untuk pendidikan hanya disediakan dana sekitar 11 trilyun, sekitar 3,8 % dari APBN yang disetujui DPR. Sementara yang diketahui masyarakat umum kemacetan hutang Liem, salah seorang konglomerat, lebih dari 53 trilyun, sehingga membuat masyarakat makin terperangah. Apalagi dana pendidikan tahun ini (2001) untuk jutaan anak bangsa yang harus dididik dan dicerdaskan hanya disediakan dana sekitar sebelas trilyun. Kebijakan ekonomi yang timpang diperparah dengan kebijakan kesehatan dan pendidikan yang diabaikan. Benar-benar memprihatinkan dana pendidikan yang minim, yang kurang dari seperempat dari dana yang dipinjam dan belum mampu dibayar seorang konglomerat Liem, karena berjumlah lebih dari 53 trilyun.

Selanjutnya penggunaan dana pendidikan yang minim ini sering di luar 'jalur'. Banyak yang mempertanyakan lahirnya proyek-proyek depdikbud, yang tetap dilanjutkan depdiknas. Proyek-proyek ini antara lain berkaitan dengan perubahan kurikulum demi kurikulum yang ada. Ini dapat dilihat dari kurikulum 1995 yang telah disempurnakan pada tahun 1997, dan kurikulum baru tahun

2000. Masyarakat juga dibuat kacau dengan perubahan nama-nama sekolah. Kalau dulu dikenal dengan nama SMEA maupun STM, sekarang hanya ada SMK. Orang juga mempertanyakan apa manfaat perubahan SMA menjadi SMU?

Buku yang dikaji ini belum mengungkap segi-segi kelemahan dari UU otonomi dan desentralisasi yang. Antara lain dalam Psl 2, PP 25 th. 2000 dikatakan: "Yang menjadi wewenang pemerintah pusat setelah berlakunya otonomi adalah bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain." Potongan kalimat: "... kewenangan bidang lain" apabila tidak diuraikan secara jelas dapat menjadi 'jebakan' dalam melaksanakan otonomi secara bermakna. Beruntungnya editor menyadari kelemahan tersebut dan sempat menuliskan:

... laporan pokja yang dimuat dalam buku ini sebagian dikembangkan pada masa transisi, ketika gagasan tentang otonomi daerah masih terus dibahas (jadi, masih sebagai wacana) dan belum menjadi keputusan final pemerintah. Oleh sebab itu, akan diketemukan istilah, idiom konsep, atau rekomendasi yang sebagian masih mengacu kepada keadaan sebelum otonomi, sebagian lainnya mencerminkan keadaan pada masa transisi, dan ada juga yang telah mengacu kepada otonomi daerah yang sekarang telah mulai berjalan (hlm. xiii).

'Jebakan' lain adalah peraturan yang dibuat DPRD setempat seperti keharusan kedudukan puncak harus diberikan atau diemban putera daerah atau non-TNI serta mereka yang menang dalam pemilu. Apalagi kalau semua ini disajikan dan dipahami serta dimaknai secara ketat. Hal ini terjadi karena seorang penguasa belum dibedakan dengan seorang pemimpin. Secara mudahnya seorang penguasa lebih mendahulukan hak dan sering melupakan kewajiban yang harus diembannya. Berbeda dengan penguasa, seorang pemimpin selalu lebih mementingkan kewajiban dan sangat memegang amanat yang diembannya serta cenderung mendahulukan wujudnya hak-hak bawahan atau mereka yang dipimpinnya.

Apalagi bila pembaca berkenan mengkaji uraian berikut ini:

Ada kecendrungan umum untuk memaknai putra daerah terbatas dalam pengertian mereka yang lahir di daerah itu, dan mempunyai nenek moyang yang juga berasal dari daerah tersebut. Artinya, mereka yang hanya memiliki salah satu dari kriteria itu termasuk kategori bukan putra daerah, alias pendatang. . . . .

. . . . . Dengan ketentuan seperti itu, mereka yang ternyata termasuk bukan putra daerah atau pendatang perlu segera dikurangi perannya dalam birokrasi pemerintahan, walaupun tidak segera disingkirkan. Itu dilakukan dengan semangat kedaerahan yang tinggi, tanpa mencermati apakah kualitas putra daerah yang dicalonkan sudah memadai untuk tugas yang diembannya. (Lihat Sjafrin, "Otonomi Daerah: Jerat-jerat Kultural", *Gatra*, 3 Maret 2001, hlm. 82.)

Dalam kaitan ini ada baiknya dibaca komentar berikut ini: "[Kebijakan ini telah melahirkan] . . . *parochial decentralization* dengan adanya konsep putra daerah, bukan desentralisasi yang sadar pasar *market conscious decentralization*. Dengan konsep sempit seakan-akan anak yang lahir akan dididik di tempat dia dilahirkan, mencari nafkah disitu, demikian pula saat pensiun sehingga wafat nantinya. (Lihat T. Raka Joni (2001: 9)

Yang perlu diperhatikan pula UU No. 22 th 1999 psl 6 ayat 1 yang berbunyi: "Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan/atau digabung dengan daerah lain." Menurut UU No. 22 th 1999 psl 11 ayat 2 Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

Akhirnya apa yang disajikan buku ini akan lebih bermakna apabila dilengkapi dengan indeks, dan *glossary*, agar memudahkan para pembaca memahami apa yang disajikan. Akan

lebih baik lagi kalau buku ini tidak sekedar dilem tapi juga dijahit, sehingga tidak lepas satu persatu halamannya saat dibaca. Walau bagaimanapun juga buku ini cukup bermutu dan perlu dimiliki mereka yang ingin memahami rimba belantara pendidikan di Indonesia.

#### Daftar Pustaka

- Ahmad Syafii Maarif (2001), "Landasan Pendidikan Indonesia Masa Depan", *Makalah Disampaikan dalam Seminar Reformasi Pendidikan Nasional*, UNY, 16-17 Maret
- Butts, R. Freeman (1973), *The Education of the West*, New York: McGraw-Hill Book Co.
- Elza Peldi Taher, "Islam di Tengah Pudarnya Agama dan Runtuhnya Martabat Manusia", dalam *Agama dan Kekerasan*, Jakarta: Kelompok Studi Proklamasi dan The Asia Foundation, 1985
- Jalaluddin Rakhmat (1998), *Islam Aktual*, Jakarta: Mizan, p. 182.
- M. Amien Rais (1997a), *Refleksi Amien Rais*, Jakarta: Gema Insani Press
- Pusat Data dan Analisa *Tempo* (2001), "Sekolah Plus Pintu Gerbang ke Luar Negeri?", *Tempo*, 18 Maret
- Revrisond Baswir *et. al.* (1999), *Pembangunan Tanpa Perasaan*, Yogya: Pustaka Pe-lajar, Idea dan Elsam.
- Sjafrin Sairin, "Otonomi Daerah: Jerat-jerat Kultural", *Gatra*, 3 Maret 2001, p. 82.
- T. Raka Joni (2001), "Permasalahan Kritis Pengelolaan Ketenagaan Guru dalam Kerangka Pikir Desentralisasi", *Seminar Komisi Reformasi Pendidikan Nasional* 16-17 Maret.

## BIODATA PENULIS

**Drajat Suhardjo**, lahir di Purworejo 5 Agustus 1948. Tamat SMA Negeri Purworejo pada tahun 1966. Tamat S1 jurusan teknik geodesi UGM tahun 1980. Jenjang S2 jurusan ilmu Lingkungan diselesaikan pada tahun 1988 di UGM. Jenjang S3 diselesaikan pada tahun 1999 pada bidang Geografi Lingkungan di UGM. Pada tahun 1991-1992 mengambil kursus singkat dalam bidang Regional Planning, pada School of Urban and Regional Planning, Faculty of Environmental Studies, University of Waterloo, Canada. Mengajar pada Jurusan teknik sipil, arsitektur dan lingkungan, FTSP UII sejak tahun 1981. Mengasuh matakuliah ilmu ukur tanah dan pemetaan, ilmu lingkungan dan rekayasa lingkungan. Karya penelitian terakhir (1999) judul: Pengaruh Lingkungan Fisik Geografi terhadap Pemilihan Tujuan Perjalanan di Kabupaten kulonprogo.

**Ferry Adenan**, dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris FBS-UNY, menyelesaikan S1 PBS Inggris di IKIP Yogyakarta, dan lulus S2 Pendidikan Bahasa IKIP Malang tahun 1986.

**Husain Haikal**, lahir di Semarang 9 September 1944. Lulus S1 .....FKIP Gajah Mada tahun 1964, BA dan Drs. FKIS IKIP Yogyakarta, S2 Duquesne University, Pittsburgh, USA; Program Ph.D di Un. Of Hawaii at manoa; S3 Universitas Indonesia.

**Lia Malla**, lahir dan dibesarkan sampai perguruan tinggi di Bandung. Sejak 1986 menjadi staf pengajar di jurusan Bahasa Asing Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman FBS Universitas Negeri Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 1997

**Sumarjo H.**, lahir di Sleman 14 April 1957, dosen Jurusan Teknik Bangunan FT-UNY sejak tahun 1983. Lulus S1 Teknik Gedung FPTK IKIP Yogyakarta tahun 1982, lulus S2 Teknik Arsitektur UGM tahun 1999. Tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kajian arsitektur antara lain: Tipomorfologi Rumah Desa, Transformasi Rumah Pinggiran Kota, Interelasi Spasial Kampus-kampus di kota Yogyakarta, Rumah Tradisional di Kota Yogyakarta.

**Sumaryanto**, adalah dosen bidang keahlian : Ilmu Kesehatan Masyarakat pada Jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.

**Tri Mulyani W.**, dilahirkan di Pulau Sanana, pada tanggal 15 September 1940. Pendidikan terakhir yang diikutinya adalah *Master in Special Education* dari *Sunny Plattsburgh* Amerika lulus tahun 1987, dan juga berijazah Certificate Program in Special Education dari Deakin University Australia selesai tahun 1994. Pekerjaan utamanya sebagai Staf Pengajar pada Fakultas Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Luar Biasa, Universitas Negeri Yogyakarta mulai tahun 1995.